



RENSTRA

**DINAS KELEUTAN DAN PERIKANAN
KOTA TERNATE**



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan perikanan dan kelautan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Perikanan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 – 2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu institusi yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Ternate memiliki tupoksi utama melayani, mengayomi dan senantiasa mencoba melakukan pembenahan dari waktu ke-waktu sebagai bentuk apresiasi terhadap pentingnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Untuk meminimalisir kesenjangan serta jarak dalam dinamika komunikasi, maka dilakukan berbagai langkah guna menjembatani hubungan baik secara internal maupun eksternal. Meskipun hal ini dirasakan masih belum optimal namun proses pergerakan menuju perubahan terus berjalan.

Secara garis besar pembangunan di Kota Ternate mengalami peningkatan karena dicapai melalui kerja keras seluruh elemen, baik instrumen pemerintahan dan masyarakat yang terus berperan aktif melalui program-program peningkatan kesejahteraan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan, perluasan lapangan kerja terutama di sektor perikanan serta perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, melalui pemberian dana bantuan serta program pelatihan kerja dan kebijakan lainnya.

Walaupun demikian tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi guna meningkatkan kesejahteraan di antaranya masih rendahnya sumberdaya manusia terutama di sektor perikanan, kurangnya akses permodalan khususnya bagi para

pembudidaya ikan terhadap sumber-sumber finansial, bahkan di beberapa wilayah terjadi degradasi potensi alam yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan, hal ini dapat dijadikan sebagai cambuk bagi pengembangan usaha sektor perikanan kedepan.

Bagaimanapun juga pembangunan sebaiknya dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam melalui pemanfaatan secara efisien dan produktif dengan tetap menjaga kelestariannya. Sumberdaya yang dianggap potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal terus dikembangkan, serta sektor-sektor yang dianggap mampu mendongkrak produktifitas harus melakukan pembenahan terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi asean dan globalisasi modern. Sektor perikanan telah terbukti resisten terhadap perubahan, untuk itu diperlukan ekonomi kerakyatan yang tangguh dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ditengah resesi dan krisis multi dimensi dimasa yang lalu.

Kota Ternate memiliki luas wilayah 5.795,4 Km² terdiri dari luas perairan 5.544,55 Km² atau 95,7 % dan daratan 250,85 Km² atau 4,3 % yang tersebar pada *Delapan* Pulau ; yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Tifure, Mayau, Maka, Mano dan Gurida di mana pulau Maka, Mano dan Gurida merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Secara astronomis Wilayah Kota Ternate terletak antara 3^o Lintang Utara dan 3^o Lintang Selatan serta 124^o Bujur Timur, sedangkan Secara geografis Kota Ternate berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara dengan Samudera Pasifik
- ❖ Sebelah Selatan dengan Laut Maluku
- ❖ Sebelah Timur dengan Selat Halmahera
- ❖ Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 maka, wilayah pemerintahan Kota Ternate secara administratif dari 7 (Tujuh) Kecamatan menjadi 8 (delapan) Kecamatan yang meliputi Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri, Batang Dua dan Ternate Barat. Dengan kondisi yang demikian, maka Kota Ternate memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan yang cukup besar, namun sampai saat ini pengelolaannya belum maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Potensi Lestari Perikanan Kota Ternate sebesar 47.838,25 ton / tahun dari standing Stock yang dimiliki sebesar 121.757,38 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, Cucut dan Tenggiri serta ikan pelagis kecil seperti ikan Layang, dan terbang. Ikan Demersal Seperti Kakap Merah, Skuda, Kakap Sejati, Ekor kuning serta berbagai jenis ikan kerapu.

Daerah penangkapan untuk pelagis besar (Tuna dan Cakalang) di perairan Kota Ternate meliputi perairan Pulau Hiri, Moti, dan Pulau Batang dua dan Laut Maluku. Dengan musim penangkapan sepanjang tahun dan musim puncak yaitu pada bulan *Januari – April* serta *September – Oktober* sedangkan daerah penangkapan pelagis kecil dan Demersal adalah pesisir Pulau Ternate, Moti, Hiri, dan Tifure Batang Dua.

Pada Tahun 2015 produksi mencapai 25.814,851 ton dengan demikian maka tingkat pemanfaatan baru mencapai 53 % dari potensi lestari, sehingga dari produksi yang dicapai tahun terakhir menunjukkan tingkat pemanfaatan masih *Under Exploitation*, sehingga peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan di Kota Ternate masih sangat terbuka. Untuk Produksi hasil perikanan Tahun 2014 adalah 22.906,860 ton dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 47 %.

Keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang demikian besar adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk mengatasinya. Permasalahan utama yang dihadapi belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, sarana prasarana perikanan dan kelautan yang belum memadai dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir khususnya nelayan kecil. Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan pada masa lalu yang lebih berorientasi ke darat yang menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sekitar daratan.

Sektor kelautan dan perikanan dalam jangka pendek diketahui sebagai sektor yang mampu memberikan dampak terhadap kegiatan produksi dari sektor lain (output multiplier) dan peningkatan pendapatan masyarakat (income multiplier). Di samping itu dalam jangka panjang sektor ini juga mempunyai keterkaitan ke depan (Forward Linkage) yang cukup besar terhadap kegiatan produksi sektor lain. Sejalan dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, membawa sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah memasuki babak baru dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagai suatu organisasi dalam pelaksanaannya perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat, agar tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Ranwal Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor No.11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) ;
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113) ;

15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016–2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kota Ternate tahun 2016-2021 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan,

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun 2021 yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan strategis dan kecenderungan perubahan global. Secara detail tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate adalah:

- a. Sebagai Pedoman melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan bagi jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate untuk selama 5 tahun mendatang.
- b. Sebagai bahan penyusunan Program dan kegiatan prioritas tahunan selama 5 tahun
- c. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
- d. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan kelautan dan Perikanan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
- e. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan p
- f. erikanan selama 5 tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun menurut Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah,, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, dengan RPJMD, Renstra Kementrian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kota dan dengan Renja PD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3 Telaahan Ranwal Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate

3.5.4 Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

3.5.5 Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan perikanan Kota Ternate memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Walikota Ternate dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di bidang Kelautan dan perikanan yang didalam kegiatannya menyangkut upaya kegiatan peningkatan Produksi Perikanan pada Pengembangan usaha Budidaya Perikanan, Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan, Pengembangan Pemesaran Hasil Perikanan, Pengembangan Perbenihan Perikanan, Pengembangan Usaha Kelautan dan perikanan, Pengawasan di Bidang Kelautan dan Perikanan serta Penyuluhan/Pembinaan dibidang Kelautan dan perikanan. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kota Ternate.

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate adalah membantu Walikota Ternate dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- b. Pemberian Rekomendasi perizinan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan terhadap nelayan;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan Pengawasan dibidang Kelautan dan Perikanan
- h. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah Kota Ternate di bidang Kelautan dan Perikanan, memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dan memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan

b. Sekretaris ;

Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas,

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengolahan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumahtangga dan perlengkapan/assetdinas, urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan ;

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan monitoring serta membuat Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Dinas dan Laporan Keuangan.

c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya ;

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pelayanan usaha dan produksi serta pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya:

1. Seksi Pelayanan Pengembangan Usaha & Produksi

Seksi pengembangan, pelayanan usaha dan produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data bimbingan, pembinaan dan pemanfaatan serta uji lapangan atas mutu sarana kelautan dan perikanan, penerapan standar pembenihan, pengembangan informasi dan teknologi penangkapan dan budidaya serta penerbitan ijin usaha di bidang kelautan dan perikanan

2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya

Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data penyusunan rencana teknis operasional sarana penangkapan dan budidaya, melaksanakan pelayanan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan pembenihan serta pembinaan pemanfaatan sarana penangkapan dan budidaya.

d. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

e. Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan system logistic produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

1. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi

Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Pengembangan Usaha dan Promosi.

2. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan termasuk produk non pangan.

f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi pengawasan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2. Seksi Penanganan Pelanggaran

Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam merumuskan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Pelanggaran.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Berfungsi melaksanakan tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Dufa-Dufa)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sarana pangkalan pendaratan ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Balai Benih Ikan (BBI/Gambesi)

Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan pembenihan dan pembudidayaan ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2. Fungsi

a. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 2) Penetapan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dengan cara mengkoordinasikan dengan kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Pembagian tugas bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu dan sesuai program;
- 4) Penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
- 5) Perumusan program dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja;
- 7) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran;
- 8) Pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka upaya pengembangan sistem, metode dan teknis pendayagunaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 9) Pelaksanaan monitoring dan menilai laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

- 10) Pengendalian dan pengawasan pengelolaan, pembinaan SDM serta pengadaan barang dinas;
- 11) Pengevaluasian dan penganalisaan pencapaian/realisasi program dengan memberi petunjuk, arahan, teguran dalam rangka pencapaian target;
- 12) Pelaksanaan penelitian, penyempurnaan dan penandatanganan naskah-naskah dinas intern dan ekstern Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 13) Pemimpin rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, pengembangan sistem dan metode serta teknis pengelolaan program kerja dan kerja sama dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 14) Pengkajian dan pengevaluasian program kerja tahunan berdasarkan realisasi pelaksanaan program serta kebijakan lebih lanjut;
- 15) Penelaah, perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan, perijinan, saran dan masukan dari masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait;
- 16) Pengembangan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas;
- 17) Pemimpin rapat-rapat koordiansi intern dan ekstern serta mengikuti rapat-rapat Dewan;
- 18) Perumusan dan penetapan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai laporan kinerja Dinas;
- 19) Pelaksanaan pembinaan pengembangan karier pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 20) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi yang meliputi ;

1. Penyusunan rencana kegiatan sekretariat
2. Melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
3. Melaksanakan urusan keuangan Dinas;
4. Melaksanakan urusan tatausaha dankerumah tanggaan serta perlengkapan dinas;
5. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;

6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas;
7. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas;
8. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas, Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
3. Pelaksanaan urusan umum perlengkapan/ aset dinas dan rumh tangga;
4. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dinas yang meliputi usul kenaikan pangkat, usul mutasi, cuti, kartu pegawai, kartu suami, kartu istri, kartu askes dan taspen, penghimpunan dan pemeliharaan daftar urut kepangkatan (DUK) serta bezeting;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan

d. Sub Bagian Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas, Sub bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian perencanaan;
2. Pengumpulan, pengolahan, pengkajian, data dan informasi di lingkungan dinas;
3. Penyusunan rencana dan program dinas;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program dinas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

e. Sub Bagian Keuangan

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian keuangan;
2. Penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
3. Pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggungjawaban;

4. Evaluasi pelaksanaan anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, perhitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawaan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

f. Bidang Perikanan Tangkap Dan Budidaya

Dalam melaksanakan tugas, bidang perikanan tangkap dan budidaya menyelenggarakan fungsi ;

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang perikanan tangkap dan budidaya;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
3. Pelaksanaan pengembangan, pelayanan usaha dan produksi di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan sarana dan prasarana di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
5. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
6. Pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan;
7. Pemberiaan perijinan di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
8. Pelaksanaan pembudidayaan ikan;
9. Penyajian data produksi ikan hasil penangkapan dan budidaya;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
11. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
12. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan

g. Seksi Pengembangan, Pelayanan Usaha Dan Produksi

Dalam melaksanakan tugas, seksi pengembangan, pelayanan usaha dan produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan, pelayanan usaha dan produksi ;
2. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian hasil produksi perikanan dan usaha bidang perikanan
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
4. Pelaksanaan seleksi standar induk dan benih unggul
5. Penyusunan dan penyajian informasi peluang usaha perikanan dan kelautan
6. Pelaksanaan tugas dan pembantuan penyaluran bantuan permodalan kepada pelaku usaha perikanan dan kelautan
7. Penyebarluasan informasi dan teknologi perikanan dan kelautan
8. Pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan
9. Penyusunan pedoman dan pembinaan pengembangan teknologi penangkapan, pengolahan dan budidaya perikanan
10. Pelaksanaan koordinasi dalam memantau keluar masuknya ikan baik dalam bentuk benih, ikan konsumsi maupun olahan serta bahan makanan hasil perikanan
11. Pelaksanaan pemberian ijin usaha perikanan
12. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian produksi perikanan dan usaha perikanan
13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

h. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya
3. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi penangkapan dan alat bantu penangkapan serta teknologi budidaya, pembenihan ikan dan biota air lainnya

4. Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya
5. Penyiapan dan pengaturan penyaluran bantuan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya
6. Pelaksanaan survey lapangan dalam rangka perencanaan pengembangan penangkapan ikan dan budidaya
7. Pelaksanaan pengaturan, bimbingan dan pembinaan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan budidaya sesuai petunjuk operasional
8. Pelaksanaan pengajian dan pengembangan sarana penangkapan dan budidaya ikan secara spesifik sesuai kepentingan dan kondisi lingkungan
9. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pemanfaatan teknologi sarana penangkapan dan budidaya ikan serta biota laut lainnya
10. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan

i. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, Pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, Pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan

- kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, Pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
4. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, Pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang bidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan, Pemberdayaan, pendampingan, implementasi ilmu pengetahuan, serta pengembangan usaha terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
 6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang Pengelolaan ruang laut dan pesisir,
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

j. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam melaksanakan tugas, seksi Pendayagunaan Pesisir dan pulau-pulau kecil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil,

2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil,
4. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil,
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pesisir, akreditasi dan jejaring pesisir terpadu, restorasi dan rehabilitasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, pemanfaatan dan pengendalian melalui izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar, serta pengendalian melalui rekomendasi dan perizinan pulau-pulau kecil,
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir.

k. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, Konservasi, Rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat,
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, Konservasi, Rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang Pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, Konservasi, Rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat,
4. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, Konservasi, Rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat,
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, implementasi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran, Konservasi, Rehabilitasi pesisir, pengembangan usaha masyarakat,
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir.

I. Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pembinaan mutu dan disversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan mutu dan disversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pembinaan mutu dan disversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
4. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan mutu dan disversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pembinaan mutu dan disversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

m. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi

Dalam melaksanakan tugas, seksi Pengembangan Usaha dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
4. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang akses pasar, promosi, kerja sama dan sistem logistik produk serta peningkatan kapasitas pasar produk dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi Pengembangan Usaha dan promosi
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

n. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas, seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan,

2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan,
4. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan,
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang standarisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan dan kelautan,
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

o. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan dan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan,
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan dan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan

- infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang penyelenggaraan dan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan,
 4. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan,
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan dan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak lanjut kelautan dan perikanan,
 6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

p. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas, seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawawsan produk dan jasa kelautan, pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati

- perairan, Pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan,
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, Pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan,
 3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, Pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan, Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, Pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan,
 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan, Pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan,
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

q. Seksi Penanganan Pelanggaran

Dalam melaksanakan tugas, seksi Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang Penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut,
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut,
3. Penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang Penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut,
4. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut,
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, bidang dan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut,
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program pada seksi Penanganan Pelanggaran,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

r. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Berfungsi melaksanakan tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Dufa-Dufa)

Dalam melaksanakan tugasnya Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan unit pelaksana teknis dinas Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membimbing dan membina bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis dinas pangkalan pendaratan ikan, agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Melakukan pembinaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana pangkalan pendaratan ikan dalam rangka meningkatkan kelancaran aktifitas dan produktifitas usaha pada unit pelaksana teknis dinas pangkalan pendaratan ikan
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kapal ikan, perusahaan ikan dan aktifitas pangkalan pendaratan ikan untuk meningkatkan kelancaran aktifitas unit pelaksana teknis dinas pangkalan pendaratan ikan.
- g. Melaporkan hasil kegiatan unit pelaksana teknis dinas pangkalan pendaratan ikan kepada kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk di jadikan bahan penyusunan program lebih lanjut
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas, baik lisan maupun tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Balai Benih Ikan (BBI)

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan unit pelaksana teknis balai benih ikan dalam hal pembenihan dan pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membimbing dan membina bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis balai benih ikan agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan restocking benih ikan air tawar dalam rangka menjamin tersedianya benih ikan
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan benih ikan air tawar secara spesifik sesuai kepentingan dan kondisi lingkungan dalam rangka peningkatan benih ikan air tawar
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas dengan tugas pokok dan fungsi untuk dijadikan bahan penyusunan program lebih lanjut.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibrikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

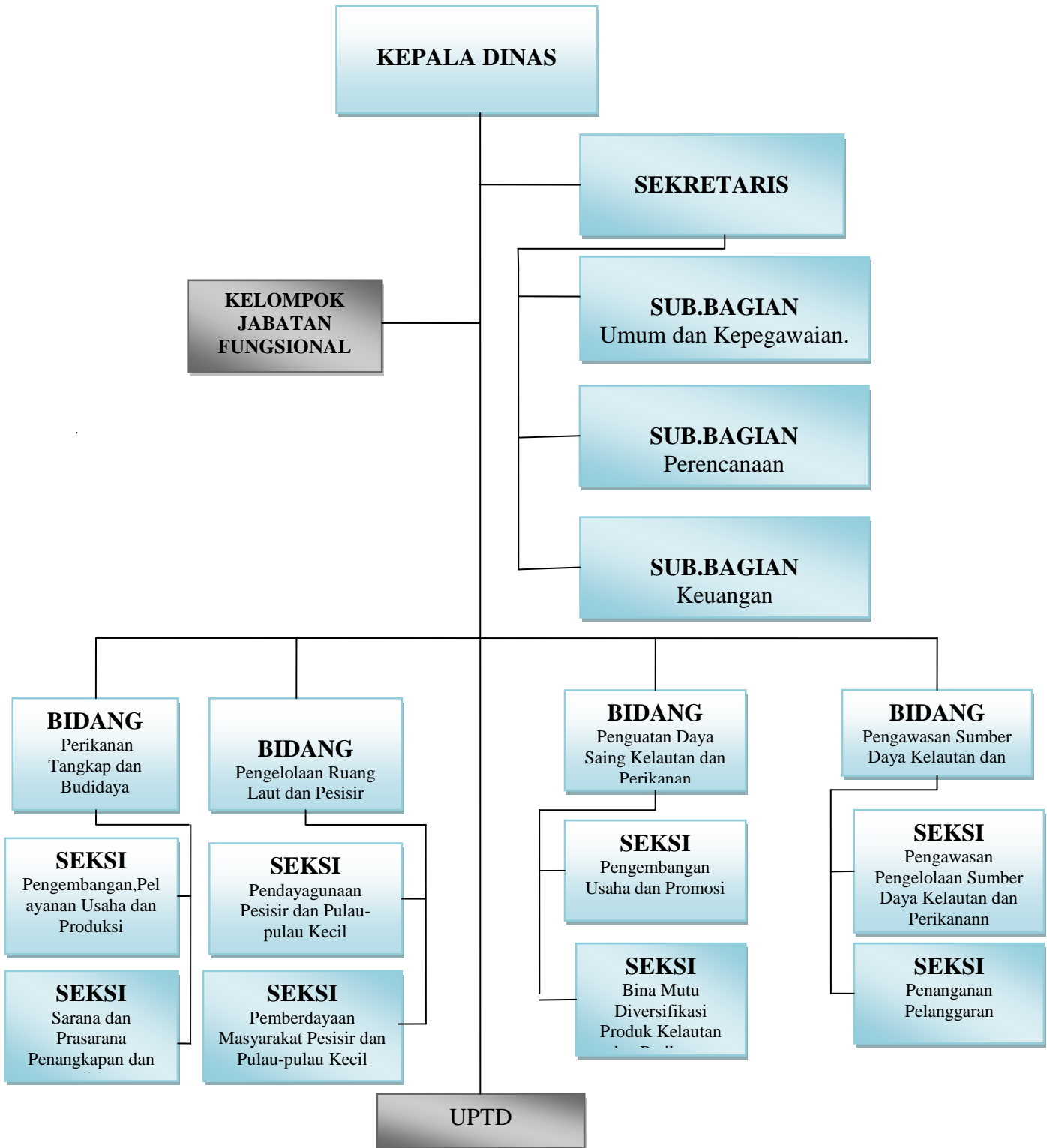
2.1.3 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate di sesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate.

- a. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - Kepala Dinas
 - Sekretaris Dinas
 - Bidang
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate terdiri dari p (empat) Bidang yaitu :
 - Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
 - Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan
 - Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Pelayanan Usaha dan Produksi
 - Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya
- e. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri dari :
 - Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- f. Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi
 - Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
- g. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - Seksi Penanganan Pelanggaran

Gambar. 2.1 STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh SDM sebanyak 61 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT		Pend. Terakhir	Jabatan / TMT	Usia
1	2	3	4		5	6	7
1	H. Ruslan Bian, Sp. M.Si	19671106198903100 5	Pembina Tk. I	IV/b	S2	Kepala Dinas	49
2	La Jusuf Wali,S.Sos	19630304198603102 8	Pembina Tk. I	IV/b	S1	Sekretaris	54
3	Abdul Rasyid Husen	19600117198205100 1	Pembina	IV/a	SMA	Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	57
4	Ir. Sufyani M. Sahami, M.Si	19670503199903200 4	Pembina	IV/a	S2	Kasie. Pemberdayaan Masy Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	49
5	Zulqifli A.S.Djawa, SP	19720806200112100 5	Penata Tk I	IV/a	S1	Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya	44
6	Faisal Do Husen,SP	19750609200312100 7	Penata Tk I	III/d	S1	Kabid. Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan	41
7	Halida Rais, S.Pi, M.Si	19780502200312201 3	Penata Tk I	III/d	S2	-	38
8	Tamrin Djumati, SE	19750107200112100 4	Penata Tk I	III/d	S1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	42
8	M. Thamrin Bopeng, S.Pi	19761003200312101 1	Penata Tk I	III/d	S1	Pj. Ka. UPTD Stasiun Pengawasan	40
10	Ida BT. Hanafi, S.Pi	19780601200312201 1	Penata Tk I	III/d	S1	Kasie. Bina Mutu Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	38
11	Trie Mingkli Sukerni, S.Pi	19700621200501201 7	Penata	III/c	S1	Kepala UPTD. Balai Benih Ikan (BBI)	46
12	Muhamad Yatim Sohi, S.Pi	19810710200604101 2	Penata	III/c	S1	Kasie. Pegawasan dan Pengendalian SDKP	36
13	Fitri H. Kabalmay, S.Pi	19730224200501200 3	Penata	III/c	S1	Kasubag Keuangan	44
14	Kartini Ishak, S.Pi	19820423200501201 3	Penata	III/c	S1	kasie. Pengembangan Usaha dan Produksi	34

NO	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT		Pend. Terakhir	Jabatan / TMT	Usia
1	2	3	4		5	6	7
15	Chairina Abd Chalik, S.Pi	19720902200312200 6	Penata Tk I	III/d	S1	Kasie. Pengembangan Pelayanan Usaha dan Produksi	44
16	M. Ismir H Yasin, SE	19730827200701102 2	Penata	III/c	S1	Pj.Ka. UPTD PPI	43
17	Rosita Dahlan, SE	19800422200604202 5	Penata	III/c	S1	-	36
18	Sukarsi, S.Pi	19760301201001200 0	Penata	III/c	S1	Staf	41
19	Suhaimi Hanafi, S.Pi	19780412200604200 0	Penata	III/c	S1	Kepala Urusan Tata Usaha UPTD PPI	38
20	Ica, SE	19820123200312200 0	Penata	III/c	S1	-	35
21	Muhammad Djen, S.Pi	19750504200112100 4	Penata	III/c	S1	Staf pd UPTD BBI	41
22	Irma Aulat, SP	19740404200604203 4	Penata	III/c	S1	-	42
23	Maryani Umaternate, SP	19760606200604201 2	Penata	III/c	S1	-	40
24	Fitriah, ST	19810808200604203 7	Penata	III/c	S2	Kasie. Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya	35
25	Abd Rahim Rasyid	19660203199103101 5	Penata	III/c	SMA	Kasie. Pengawasan Pengolahan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	58
26	Iskandar, S.Pi	19860611200903100 0	Penata	III/c	S1	Kabid. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30
27	Muhammad Effendy Sadjid, SH	19760721201001100 4	Penata	III/c	S1	Kasie Penanganan Pelanggaran	40
28	Suhaimi Masuku	19640930198601200 2	Penata Muda Tk.I	III/b	SMA	Staf	52
29	Musna Iskandar Alam, S.Pi	19760819200701201 6	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	Staf	40
30	Nurani Ronga	19660117199002000	Penata Muda Tk.I	III/b	SMA	Staf	51

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT		Pend. Terakhir	Jabatan / TMT	Usia
1	2	4	5		6	7	9
31	Ismail Marsaoly	195911151993031003	Penata Muda Tk.I	III/b	SMA	-	57
32	Apriyanti Umasangadji, SE	19810407 200901 2 001	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	Bendahara Barang	35
33	Nurhafni A. Saleh, S.Pi	198110252009012002	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	Staf	35
34	Fadila Trisnawati,S.Pi	198402212009022002	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	-	33
35	Raudah T Soamole, S.Pi	197703042010012002	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	Staf	40
35	Lailiyul Qorimah, S.Pi	198107012010012001	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	-	35
37	Bukhari Soleman, S.Kel	198108182010011000	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	Kasubag Perencanaan	35
38	Husnul Chatima, S.Pi	198508152010012000	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	Bendahara Penerimaan	30
39	Mira Maharani,S.Pi	197804152010012006	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	-	38
40	Isra Ali,S.Pi	19840928 201001 1 004	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	-	30
41	Fadila Hi. Nadar, S.Pi	198404212011012002	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	-	31
42	Risnawati,S.Pi	197909022010012002	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	-	36
43	Wahyuni A. Kasim, S.Pi	198206182003122005	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	-	34
44	Firman Suaib, S.Pi	198206182010011004	Penata Muda	III/a	S1	-	30
45	Ilham Hamid, S.Pi	19790810 201101 1 001	Penata Muda	III/a	S1	-	
46	Samroni Tomaito	197812242003121005	Penata Muda	III/a	SMA	-	38
47	Masnun Husen	196408102001122001	Pengatur	II/c	SMA	-	52
48	Astinisa Arief	197810142005012011	Pengatur	II/c	SMA	-	38
49	Asrul	198709262006041001	Pengatur	II/c	SMA	-	29

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT		Pend. Terakhir	Jabatan / TMT	Usia
1	2	3	4		5	6	7
50	Ade Lun Hamid	19610704200604 1 006	Pengatur Muda	II/c	SMA	-	52
51	Musdi Laanda	197808092007011019	Penata Muda Tk.I	II/b	SMA	-	36
52	Ridwan Andi	198101012009011002	Penata Muda Tk.I	II/b	MAN	Staf	34
53	Johan Samad	198206182010011004	Penata Muda Tk.I	II/b	SMA	Bendahara Pengeluaran	33
54	Im Wahid	196909092012121002	Pengatur Muda	II/a	SMA	-	45
55	Godi Umagapi	197207272012121001	Pengatur Muda	II/a	SMA	-	42
56	Haruna	197412312012121004	Pengatur Muda	II/a	SMA	Staf	40
57	Djakia Ishak	197712302012122001	Pengatur Muda	II/a	SMA	-	37
58	Fasten Tarusy	196906082012121001	Pengatur Muda	II/a	Diploma I	-	45
59	Samsul Bachtiar Maya	198102022012121001	Pengatur Muda	II/a	SUPM	-	33
60	Suria Usman,S.Pi	19810209 201502 2 001	CPNS	III/a	S1	-	36
61	Nabila Assagaf	19890910 201502 2 002	CPNS	III/a	S1	-	27

Dari data di atas jumlah pegawai dapat dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

a. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 43 orang
- Golongan II : 16 orang
- Golongan I : -
- Kontrak pusat : -
- PTT : 49.orang
- Sukarela : 6 orang

b. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan :

- Magister : 8 Orang
- Sarjana : 35 Orang
- D III : 1 Orang
- SLTA : 16 Orang

2.2.1 Data-data Kondisi Dinas kelautan dan Perikanan

Pembangunan disektor perikanan harus ditembuh kembangkan menjadi industri perikanan. Untuk mewujudkan perikanan sebagai suatu industri sudah semestinya sarana dan prasarana di bangun dan dikembangkan. Prasarana dan sarana perikanan tangkap biasanya terdiri dari pelabuhan perikanan (PP) dan pusat pendaratan ikan (PPI), Laboratorium Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, armada penangkapan, dan alat tangkap.

Sedangkan prasarana dan sarana perikanan budidaya biasanya terdiri dari Balai Budidaya, Keramba, Tambak, dan Kolam.Sampai dengan tahun 2015 jumlah prasarana perikanan tangkap meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan dan sarana Cold Chain System (CCS) dengan masing-masing kapasitas sebagai berikut :

Daftar. . Fasilitas-Fasilitas PPI Dufa-Dufa Tahun 2016

No.	Sarana & Fasilitas	Kapasitas	Luas	Lokasi	Nilai
	Fasilitas Pokok				
1	Dermaga	-	180 m ²	Dufa-Dufa	2.165.304.500
2	Jetty	-	90 m ²	Dufa-Dufa	
3	Drainase	-	80 m ²	Dufa-Dufa	63.200.000
4	Jalan Aspal	-	120 m ²	Dufa-Dufa	758.799.000
	Fasilitas Fungsional				

5	Gedung Kantor PPI	7 Ruangan	320 m ²	Dufa-Dufa	919.500.000
6	Tempat Pelelangan Ikan	-	180 m ²	Dufa-Dufa	225.000.000
7	Pabrik Es/ Gedung	10 Ton/Hari	200 m ²	Dufa-Dufa	2.006.725.000
8	Ice Storage	10 Ton	-	Dufa-Dufa	211.093.000
9	Air Blast Freezer/Gedung	5 Ton/Hari	105 m ²	Dufa-Dufa	737.313.000
10	Cold Storage/Gedung	50 Ton	119 m ²	Dufa-Dufa	591.272.000
11	Air Bersih /Gedung	-	9 m ²	Dufa-Dufa	
12	Instalasi listrik/Gedung	-	15 m ²	Dufa-Dufa	194.0000.000
13	Ruang Timbang	2 Ruangan	64 m ²	Dufa-Dufa	89.000.000
14	Gudang Peralatan Kerja	-	28 m ²	Dufa-Dufa	51.445.000
15	Pagar Keliling	-	220m ¹	Dufa-Dufa	165.987.000
16	Bengkel Motor Laut	-	-	Dufa-Dufa	230.700.000
17	Gedung Komersil	-	-	Dufa-Dufa	4.015.000.000
18	MCK	-	48 m ²	Dufa-Dufa	50.000.000
19	Kedai Pesisir	3 Ruangan	81 m ²	Dufa-Dufa	231.000.000
20	SPDN	15 Ton	20 m ²	Dufa-Dufa	-
21	Mess Karyawan PPI/ Guest House	-	54 m ²	Dufa-Dufa	991.100.000
22	Pos Pengawasan	1 Ruangan	25 m ²	Dufa-Dufa	-
23	Guest House	6 Ruangan		Dufa-Dufa	
24	Fasilitas lainnya				967.972.000

Daftar Sarana dan Fasilitas Balai Benih Ikan Gambesi Kota Ternate, 2016.

NO	SARANA & FASILITAS	LOKASI	NILAI
1	Kantor BBI	Gambesi	143.000.000
2	Pompa, Hi- Blower dsb	Gambesi	56.900.000
3	Saluran Samping Kolam	Gambesi	72.382.000
4	Rumah Panen Larva	Gambesi	96.210.000
5	Keramba Jaring Apung	Fitu	99.885.500
6	Lantai Rabat Samping Kolam	Gambesi	67.487.000
7	Atap Penutup Kolam	Gambesi	97.683.000
8	Sumur Bor & Instalasi	Gambesi	524.500.000
9	Mess Karyawan BBI	Gambesi	

2.2 KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata Kerja Daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan melalui:

- a. Pembinaan umum dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Pembinaan teknis dibidang tehnologi kelautan dan perikanan dalam batas kewenangan kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan pemberian ijin rekomendasi dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya dalam batas kewenangan Kota Ternate;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan;
- e. Pengkajian, penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- f. Pengembangan wilayah pesisir berbasisi maritime dan Pulau-pulau kecil
- g. Pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- h. Pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate senantiasa memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat yaitu mudah, cepat dan terjangkau. Kualitas pelayanan aparatur pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pemberian pelayanan dan manajemen yang baik kepada masyarakat.

dalam upaya meningkatkan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan masyarakat Kota Ternate termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan

Jenis pelayanan dasar yaitu :

Tabel. 2.3

NO	NAMA PELAYAN	TUJUAN PELAYANAN
1	Penyediaan Data, Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	Menyediakan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan sebagai referensi/acuan untuk karya tulis ilmiah dan pengembangan rencana usaha/produk kelautan dan perikanan
2	Penyewaan Gedung BPN PPI untuk keperluan perhelatan umum	Menyediakan ruangan BPN kepada Masyarakat dan stake holder untuk keperluan perhelatan Umum
3	Pemberian Rekomendasi izin usaha penangkapan ikan (SIUP)	1. Memberikan peluang usaha di bidang penangkapan ikan sesuai dengan rencana produksi yang telah ditetapkan 2. Menciptakan lapangan kerja di Bidang penangkapan ikan 3. Menjaga keadilan berusaha diantara para pelaku usaha 4. Menjamin keberlanjutan usaha
4	Rekomendasi Penerbitan/ Perpanjangan izin penangkapan ikan (SIPI)	Memberikan legalitas/perlindungan hukum kepada pelaku kegiatan penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan di bidang penangkapan ikan
5	Rekomendasi Penerbitan/ Perpanjangan SIKPI Perubahan	Memberikan legalitas/perlindungan hukum kepada pelaku kegiatan penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan
6	Pembuatan Kartu Nelaya	Memberikan legalitas/Identetias hukum kepada Nelayan
7	Pembuatan Asuransi Nelayan	Memberikan Jaminan Asuransi Kecelakaan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan
8	Pelayanan Jasa Tambat Labuh	Kelancaran kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan yang akan melakukan dan setelah melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan.
9	Pelayanan Penjualan Es	Untuk membantu stakeholder di pelabuhan perikanan dalam penyediaan kebutuhan es
10	Pelayanan Penjualan Air Bersih	Untuk membantu stakeholder di pelabuhan perikanan dalam penyediaan kebutuhan air
11	Pelayanan Jasa Bengkel	Membantu masyarakat/stakeholder menyediakan jasa bengkel
12	Pelayanan Penyimpanan pada unit pendingin	Untuk membantu stakeholder yang membutuhkan unit pendingin untuk menjagamutu ikan
13	Pemeriksaan kelaikan operasi kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO)	Memberikan kepastian bahwa kapal perikanan memiliki kelaikan administrasi dan teknis untuk melakukan operasi perikanan.
14	Pelayanan PKL / Magang Mahasiswa dan SMU Kejuaraan (Pelayanan Jasa Publik)	Memberikan sarana untuk kegiatan PKL / magang
15	Pelayanan Penginapan <i>Guest House</i> (Pelayanan Pelengkap/ Tambahan)	Memberikan sarana Penginapan

2.3.1 Kondisi Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap

Produktivitas para nelayan Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan armada perikanan yang secara nasional masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal ikan berukuran rata-rata 0,5 sampai 3 *gross tonnage* (GT). Kelemahan dari menggunakan armada kecil antara lain para nelayan memiliki hari layar yang singkat (*one day fishing*), daya tampung ikan hasil tangkapan yang kecil, kualitas ikan yang kurang terjaga atau tingginya tingkat kehilangan mutu (*losses*), yang berakibat pada daya jual yang rendah, sementara biaya produksi terus meningkat. Kondisi seperti ini, ditambah dengan keterbatasan untuk memanfaatkan dana perbankan, semakin menyulitkan para nelayan untuk keluar dari jerat kemiskinan yang melilit dari tahun ke tahun.

Tabel 2.3.1. Perkembangan Armada Penangkapan Ikan di Kota Ternate Tahun 2015

No	VOLUME ARMADA (GT)	TAHUN 2015
1	Perahu Tanpa Motor	1.630
2	Perahu Motor Tempel	664
3	Kapal Motor	
	- < 5 GT	125
	- 5 < 10 GT	127
	- 10 < 20 GT	56
	- 20 > 30 GT	-
	Jumlah	2.602

Dari tabel diatas terlihat masih tinggi jumlah armada penangkapan/perahu tanpa motor. Ini menjadi perhatian untuk 5 tahun kedepan, sehingga program dan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap lebih fokus dalam menjawab kebutuhan akan armada penangkapan, alat bantu penangkapan dan alat penangkapan.

Tabel 2.3.2. Produksi Perikanan Tangkap

Kecamatan	2013 (ton)	2014 (ton)	2015 (ton)	2014 (ton)	2015 (ton)
Pulau Ternate	2.629,02	3.120,62	3.516,78		
Moti	2.531,00	3.004,27	3.385,65		
Ternate Selatan	4.182,60	4.964,70	5.594,96		
Ternate Utara	4.460,40	5.294,44	5.966,56		
Ternate Tengah	1.125,86	1.485,95	1.674,58		
Pulau Batang Dua	2,081.40	2.470,60	2.784,24		
Pulau Hiri	2.162,02	2.566,29	2.892,08		
Jumlah Total	19.293.30	22.906,86	25.814,85		

Bidang Budidaya Perikanan

Kondisi penurunan sumber daya ikan ini mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi secara nyata (*significant*) melalui kegiatan perikanan tangkap. Gambaran mengenai kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Indonesia untuk kembali bertumpu pada kegiatan perikanan budidaya, sementara upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut dan perairan umum, kapasitas dan cakupannya terus ditingkatkan. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu menaikkan produksi perikanan secara nyata. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini pun tetap berada di bawah ancaman kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi lingkungan harus benar-benar menjadi perhatian dalam mengawal target produksi ikan sebagai produsen terbesar.

Budidaya Perikanan yang populis dipembudidaya kita adalah ikan air tawar (Nila, Mas dan Mujair), sedangkan untuk komoditi lain belum dikembangkan. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan mendukung untuk membudidayakan komoditi apapun tergantung dengan apa yang mau dibudidayakan.

Mencermati akan kurang populisnya usaha budidaya perikanan, Dinas akan berupaya dalam lima tahun ke depan membuat terobosan-terobosan dalam memaksimalkan potensi budidaya perikanan kita, selain itu menyiapkan sumberdaya manusianya. Komoditi yang akan dikembangkan adalah Rumput Laut, Ikan Kerapu dan Baronang.

Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Penanganan produksi pasca panen hasil penangkapan menjadi perhatian penting, dimana masyarakat perlu dieducation tentang bagaimana mengkonsumsi hasil-hasil perikanan sehingga tidak dirugikan. Dinas Kelautan dan Perikanan terus mensosialisasikan dan menyiapkan sarana prasarana penunjang (sistem rantai dingin) sehingga kegiatan-kegiatan pasca panen memberikan hasil yang maksimal apabila produk-produk hasil tangkapan dan olahan dikonsumsi oleh masyarakat.

Tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia pada setiap daerah turut mengetatkan persyaratan mutu produk hasil perikanan pasca panen. Sehingga beberapa produk olahan yang menjadi perhatian untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.3. Jenis-Jenis Olahan.

No	Jenis Olahan	Bahan Baku	Keterangan
1	Kecap Ikan	Limbah Ikan (lambung Ikan)	Sudah dipromosikan sampai ke tingkat Nasional
2	Abon Ikan	Ikan Tuna/Cakalang	Sudah dipromosikan sampai ke tingkat Nasional
3	Ikan Asap/Fufu	Ikan Tuna/Cakalang	Waktu penyimpanan masih relatif singkat
4	Bakso Ikan	Ikan Tuna/Layang	Sosialisasi dan pelatihan
5	Otak-Otak	Ikan Layang/Kembung	Sosialisasi dan pelatihan
6	Nugget Ikan	Ikan Tuna/Tarusi	Sosialisasi dan pelatihan

Selain itu terbatasnya penerapan standar nasional Indonesia (SNI) pada UPI (Unit Pengolahan Ikan) skala kecil dan terbatasnya surveilensi penerapan pengendalian mutu

di UPI dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (*quality assurance dan food safety*), kedepan menjadi perhatian khusus.

Bidang KP3K & PSDKP

Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berada di perairan Indonesia dan Kota Ternate khususnya, baik laut maupun perairan umum cenderung mengalami degradasi dalam satu dekade terakhir ini, utamanya yang berada di perairan umum daratan maupun perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya ikan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (*overfishing*) yang dilakukan secara *illegal* baik oleh pelaku dalam negeri, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin, maupun oleh pihak asing yang melakukan praktik-praktik *illegal* di Indonesia.

Mengacu pada kenyataan yang ada, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate lewat beberapa program dan kegiatan mencoba mengkondisikan agar potensi pesisir dan lautan tetap terjaga. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah : Rehabilitasi daerah terumbu karang, Pembangunan infrastruktur daerah pesisir, Operasi Pengawasan Laut Terpadu, penanaman hutan mangrove, penyediaan air bersih untuk masyarakat pesisir, pembuatan PERDA ZONASI dan Pelaksanaan Program CCDP-IFAD.

Mengingat tugas dan tanggungjawab, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap komitmen menyelaraskan aktifitas masyarakat pesisir dan lingkungan dimana mereka bermukim,

selain itu daya dukung lingkungan yang semakin hari semakin tidak tertata, akan di tata sesuai dengan amanat yang terkandung dalam PERDA ZONASI.

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

1. Panjang Pantai : \pm 124 Km
2. Tipe Pantai : landai
3. Hutan Mangrove : ada, kondisi secara umum **cukup baik**
 - a. Bagus : 321 ha
 - b. Sedang : 55 ha
 - c. Rusak : 34 ha
4. Terumbu Karang: ada, kondisi secara umum **cukup baik**
 - a. Bagus : 25 – 50(%)
 - b. Sedang : - (%)
 - c. Rusak : < 25 (%)
5. Padang Lamun : ada, kondisi secara umum **cukup baik**
6. Ekosistem Pesisir Lainnya : Ekosistem Pantai

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Ternate

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian					Kondisi Akhir RPJMD Kota Ternate Tahun 2011-2015
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	16.057,18	18.465,75	19.298,30	22.906,86	25.814,85	25.814,85
Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Olahan	30 Unit	44 Unit	48 Unit	50 Unit	51 Unit	51 Unit
Jumlah Kelompok Pengolah yang Terbina	7 Klp	8 Klp	8 Klp	9 Klp	11 Klp	11 Klp
Peningkatan Kawasan Pemulihan Ekosistem mangrove	0.05 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha
Menurunnya Tingkat Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	7%	5%	4%	4%	3%	3%
Berkurangnya pelanggaran hukum dilaut	6 kasus	5 kasus	5 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan

Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Ternate dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu:

Permasalahan :

Permasalahan pokok dalam peningkatan produksi perikanan dan kelautan Kota Ternate antara lain :

- Modal kerja untuk kegiatan usaha perikanan masih terbatas, serta fasilitas skim kredit yang tersedia masih kurang menjangkau para nelayan.
- Belum berkembangnya organisasi kelompok nelayan yang solid dan mandiri sehingga akses terhadap fasilitas perbankan masih rendah
- Sarana dan prasarana usaha perikanan belum memadai (sarana parasarana masih berskala kecil dan tradisional).
- Manajemen usaha dan keterampilan nelayan kurang memadai dan aspek pendidikan dan pelatihan.
- Penguasaan teknologi penangkapan ikan maupun pasca panen dan pengolahan hasil masih rendah.
- Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tidak menguntungkan bagi Indonesia.
- Adanya kesan bahwa investasi dibidang perikanan penuh resiko dan kurang menarik.
- Kesempatan untuk memperoleh dan menguasai tehnologi perikanan masih kurang.
- Keadaan cuaca buruk dan musim paceklik ikan yang kadang berkepanjangan
- Alokasi dana masih kecil, karena kurang seimbang dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi bidang kelautan dan perikanan

3.1.1 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal Kota Ternate dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ternate dalam lima tahun mendatang (2016-2021). Analisa lingkungan eksternal berkaitan dengan tiga arus perubahan yang terjadi, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

3.1.2 Analisa Peluang Daerah

Globalisasi yang ditandai oleh perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas Negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar Dalam Negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Kota Ternate :

- a. Posisi strategis Kota Ternate akan menjadi pusat pertumbuhan (aglomerasi) Maluku Utara, mata rantai perekonomian yang menghubungkan Wilayah Maluku Utara dengan Wilayah Tengah dan Wilayah Timur Indonesia.
- b. Posisi Kota Ternate sebagai pusat perdagangan menjadikan daerah yang diperhatikan dan dianggap penting secara regional dan nasional.
- c. Pengembangan kerja sama antarkawasan secara lebih luas dan nyata diharapkan nantinya akan memberi nilai tambah investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Ternate.
- d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kota Ternate
- e. Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya Terutama Wisata Bahari Kota Ternate.

1. Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Kota Ternate untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:
 - a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan selalu dilakukan secara transparan, partisipatif, adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, dan hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat.
 - b. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.
3. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya bagi pemerintah daerah yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
 - a. Dengan kewenangan otonomi daerah dan ketersediaan sumber daya alam yang tersedia, Pemerintah Kota Ternate akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
 - b. Pemerintah Kota Ternate akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, muda, murah dan bermutu.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan local, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.

3.1.3 Analisa Ancaman Daerah

1. Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman Kota Ternate, yaitu:
 - a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk hutan dan laut secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan.
 - b. Krisis ekonomi dan krisis energi berasal dari gejolak pasar internasional dan nasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah.
2. Demokratisasi terkadang membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi keberlanjutan pembangunan, yaitu:
 - a. Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil sering kali memerlukan waktu yang panjang, bertahap dan tidak pasti sehingga berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan.
 - b. Pelaksanaan demokrasi sering kali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat
 - c. Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengabaikan aspirasi masyarakat.
3. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan, yaitu:
 - a. Berbagai peraturan perundang-undangan sering kali tidak konsisten dan kurang sosialisai sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di daerah.
 - b. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi seringkali menumbuhkan persaingan antardaerah yang cenderung mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang.
 - c. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah.

- d. Meningkatnya kesenjangan antar kota-kota di Indonesia sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.

3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi Kota Ternate dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mencapai target Visi Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan diperlukan dukungan berbagai instrumen lainnya sebagai modal pembangunan. Dukungan modal pembangunan dimaksud merupakan dimensi yang saling terkait antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dukungan berbagai dimensi dapat berupa :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pengembangan pada sektor Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2016-2021 melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait guna mewujudkan kemandirian dalam menciptakan inofasi baik disektor Kelautan maupun pada sektor Perikanan. Targetnya adalah mewujudkan Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan mempunyai daya saing, yaitu memiliki standart Nasional, daya cipta kreatif yang mampu bersaing dengan pasar global, sehingga mengacu peningkatan pendapatan masyarakat, dan menurunkannya angka kriminalitas dan terbukanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan;

2. Dukungan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan pengembangan Kelautan dan Perikanan sepanjang kurun waktu tahun 2016-2021 di Kota Ternate sangat membutuhkan dan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam apapun jenisnya, memiliki keterbatasan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pengembangan yang dilaksanakan jika tidak dikendalikan dalam kurun waktu tertentu pasti akan menurunkan daya dukung

ekosistem, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi Produksi dan industri pengolahan ikan. Maka dengan demikian demi untuk mewujudkan wawasan lingkungan yang baik perlu di lakukan beberapa hal yang salah satunya adalah peningkatan Pengembanagan Budidaya.

3. Modal Sosial

Pelaksanaan pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 di Kota Ternate dilakukan melalui berbagai pembinaan dan pelatihan baik yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate maupun dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Melalui pembinaan dan pelatihan tersebut, maka capaian target utama dari pengembangan yang dilaksanakan, selain menambah kualitas sumber daya manusia adapun juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mutu produk yang dihasilkan lebih baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Bermoral, Agamis, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat khususnya Nelayan dalam hal pembinaan Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan;
- b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Perikanan, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

3.2.1. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Kota Ternate Yang Mandiri Adil dan Sejahtera. Hal ini untuk menciptakan Kota Ternate yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, yang kokoh, mandiri dan berkeadilan.

Misi Kedua, Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamis. Hal ini untuk menciptakan sosok Kota Ternate yaitu manusia yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Ketiga, Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan. Hal ini untuk menciptakan Kota Ternate sebagai daerah jasa perdagangan yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan daerah.

Misi Keempat, Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim. Hal ini untuk menciptakan sosok Kota Ternate yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui jalur segitiga emas, yang memobilisasi arus perdagangan dari kabupaten/kota di luar Kota Ternate.

Misi Kelima, Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari. Hal ini untuk menciptakan sosok Kota Ternate sebagai kota yang mempunyai Seni, Budaya dan Pariwisata yang tangguh dengan basis sejarah dan bahari.

Tabel 3.1. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim				
1.	Mempromosikan potensi unggul di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah	Terpromosikan potensi unggul di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah	Memfasilitasi berkembangnya potensi unggul di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah	Mengembangkan potensi unggul di wilayah pesisir Kota Ternate sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
2.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan laut dan poros maritim dunia	Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan laut dan poros maritim dunia	Menyusun design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan laut dan poros maritim dunia.	Membangun kerjasama untuk tersusunya design besar pengelolaan wilayah pesisir dalam mendukung integrasi pembangunan laut & poros maritim dunia
3.	Membangun wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Terbangunnya wilayah pesisir di Kota Ternate yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Penyusunan pedoman pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.	Penerbitan Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis lingkungan hidup berkelanjutan
4.	Peningkatan partisipasi Masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan	Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan	Memfasilitasi meningkatnya partisipasi masyarakat dan perempuan dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan bidang kelautan dan perikanan
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung Pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur laut, darat dan udara dalam mendukung pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah	Membangun dan mengembangkan infrastruktur laut, darat dan udara dalam pengelolaan potensi wilayah pesisir sebagai potensi unggulan daerah
6.	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk peningkatan kesejahteraannya	Meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya	Mendorong minat masyarakat untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir untuk meningkatkan Kesejahteraannya	Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir untuk Meningkatkan kesejahteraannya

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan,serta menciptakan lapangan kerja.

Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan

daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang No.01 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah diubah dengan Undang-Undang No. 01 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Untuk itu, KKP akan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Dengan demikian, industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan nasional, yang membawa multiplier effect sebagai prime mover

perekonomian nasional. Di samping itu, KKP mulai tahun 2012 akan melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang merupakan Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 di mana untuk RTRW Kota Ternate

sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 s/d 2023 yang di dalamnya terdapat kebijakan kawasan pesisir berupa penentuan zonasi tata ruang di dalam kawasan pesisir dan mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan serta tentang kawasan minapolitan.

Peraturan daerah kota Ternate nomor 02 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota ternate Tahun 2012 – 2032 Bab 2 Pasal 2 bahwa Penataan Ruang Kota Ternate Bertujuan untuk Mewujudkan Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang Adil, Mandiri, dan Berkelanjutan berbasis pada sektor unggulan Jasa dan Perdagangan, Perikanan, dan Pariwisata.

Strategi pengembangan kegiatan sektor unggulan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf d terdiri atas :

- a. Mengembangkan industri berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berdasarkan arahan ruang;
- b. Mengembangkan fasilitas jasa dan perdagangan dalam mendukung sektor perikanan dan pariwisata;

- c. Mengatur dan mengendalikan kegiatan perdagangan informal, membinakegiatan usaha perdagangan informal secara bertahap agar dapat menjalani aktivitasnya tanpa memanfaatkan ruang terbuka publik;
- d. Mengembangkan dan menata obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan;
- e. Merevitalisasi pasar-pasar tradisional sehingga memiliki daya tarik dan daya saing tersendiri; dan
- f. Mendorong pengembangan investasi pusat jasa perdagangan modern berskala pelayanan nasional dan regional dengan mempertimbangkan eksistensi pasar tradisional.

Strategi pengembangan kawasan unggulan ditinjau dari kompetensi daya saing dalam skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a terdiri atas :

- a. Menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan jasa perdagangan, perikanan dan pariwisata sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kota; dan meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penentuan zonasi tata ruang dalam kawasan pesisir dan pengembangan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut di wilayah Kab/Kota meliputi kawasan pesisir Kota Ternate	Penentuan zonasi tata ruang dalam kawasan pesisir dan pengembangan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut telah diperdakan.	Pemantapan, peningkatan dan pengembangan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut	Kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi komoditi sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut	Sepanjang pesisir Kota Ternate

	Kawasan Peruntukkan Perikanan berupa Kawasan minapolitan meliputi: a. Kecamatan Ternate Utara; b. Kecamatan Ternate Tengah; c. Kecamatan Ternate Selatan; d. Kecamatan Pulau Ternate; e. Kecamatan Hiri; f. Kecamatan Moti; g. Kecamatan Batang Dua	Kawasan Minapolitan telah ditetapkan oleh Kementerian kelautan	Pemantapan dan pengembangan Kawasan Minapolitan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan	Ketersediaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan berfungsi sebagai acuan pengembangan dan konsolidasi ruang berbagai sektoral yang menunjang di dalamnya agar tidak tumpang tindih	Kecamatan

Tabel 3.2. Rencana Tata Ruang Wilayah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu, maka potensi KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu-isu strategis Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tidak lepas dari Potensi dan Permasalahan dalam penanganan bidang kelautan dan perikanan.

a. Potensi

Kota Ternate memiliki luas laut lebih kurang 5.795,5 km² dengan garis pantai sepanjang 124 km, dengan potensi sumber daya, terutama sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. dengan jumlah Produksi Tahun 2015 sebesar 25.81,85

Disamping potensi penangkapan ikan terdapat potensi pengembangan perikanan disektor budidaya (a) budidaya laut yang terdiri dari budidaya rumput laut (1000 Ha), budidaya ikan kakap, kerapu dan juga teripang (b) budidaya air Tawar seluas 5.200 Ha untuk tambak (c) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (sungai, danau, rawa), kolam air tawar (d) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri seperti bahan baku pakan, benih ikan dan juga industri pangan.

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Kota Ternate masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong **pemulihan ekonomi** akibat **krisis global**.

Potensi dan peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan meliputi

- (1) perikanan tangkap
- (2) perikanan budidaya
- (3) industri pengolahan perikanan
- (4) industri bioteknologi
- (5) Pengembangan wisata bahari
- (6) pengembangan kawasan industri perikanan terpadu.

Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor perikanan sebagai **PrimeMover** pembangunan ekonomi daerah, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang perlu didukung dengan kebijakan politik, ekonomi serta iklim investasi yang kondusif. Dalam hal ini koordinasi dan dukungan **stakeholder** menjadi salah satu persyaratan yang sangat penting. Disamping potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula **Potensi Kelembagaan** seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kota Ternate, LSM daerah yang peduli akan pembangunan sector kelautan dan perikanan yang dimasa yang akan datang perlu disinergikan guna keberhasilan bersama. Potensi lain adalah sarana dan prasarana yang telah ada seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) , Balai Benih Ikan. SMK Perikanan, Jurusan Perikanan pada Universitas Khairun dan Universitas Muhammadiyah. dll.

1. Potensi Pasar di Daerah

Dengan jumlah penduduk mencapai 212.997 jiwa pada tahun 2015, bila tingkat konsumsi ikan pada tahun 2016 sebesar 47 Kg/kapita maka jumlah produk perikanan yang terserap untuk konsumsi pasar di daerah adalah sebesar 7.100 ton/tahun tersebut, jumlah ini masih dalam kebutuhan pangan saja belum kebutuhan industri seperti cold storage dsb.

2. Potensi Pasar Nasional (Domestik)

Produk perikanan dipasar nasional (domestik) berguna untuk menyediakan kebutuhan pangan berupa protein hewani dimana sekitar 60-65% kebutuhan protein hewani bersumber dari produk perikanan. Potensi konsumsi ikan nasional mencapai 5,3 juta ton pada tahun 2014, hal ini didasarkan pada jumlah penduduk indonesia sekitar 217 juta dengan tingkat konsumsi ikan perkapita mencapai 36,18 Kg/kapita. Disamping itu produksi perikanan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri seperti pengolahan ikan, obat-obatan dll.

3. Potensi Pasar Ekspor

Seiring peningkatan penduduk dunia, permintaan terhadap produk kelautan dan perikanan dipasar diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Peningkatan kesadaran manusia terhadap produk perikanan sebagai makanan yang sehat, bernilai gizi tinggi, rendah kolesterol dan mengandung omega 3 untuk peningkatan kecerdasan.
- b. Dampak consumption mass dari globalisasi menuntut produk pangan yang dapat diterimasecara internasional (food become more international) tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan maupun agama. Hal ini karena produk perikanan adalah komoditas pangan yang memenuhi syarat tersebut.
- c. Semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika dan makanan serta minuman yang berbahan dasar dari perairan.

b. Permasalahan

Sumber daya ikan yang berada di perairan baik laut maupun perairan umum cenderung mengalami degradasi dalam satu dekade terakhir ini, utamanya yang berada di perairan umum daratan maupun perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya ikan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (destructive fishing), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan (overfishing) yang dilakukan secara illegal baik oleh pelaku dalam negeri, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin, maupun oleh pihak asing yang melakukan praktik-praktik illegal di Indonesia.

Kondisi penurunan sumber daya ikan ini mengakibatkan kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi secara nyata (significant) melalui kegiatan perikanan tangkap. Gambaran mengenai kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Dinas

Kelautan dan Perikanan untuk kembali bertumpu pada kegiatan perikanan budidaya, sementara upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut dan perairan umum, kapasitas dan cakupannya terus ditingkatkan. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu menaikkan produksi perikanan secara nyata. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini pun tetap berada di bawah ancaman kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi lingkungan harus benar-benar menjadi perhatian dalam mengawal target produksi ikan sebagai produsen terbesar.

Produktivitas para nelayan hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan armada perikanan yang secara nasional masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal ikan berukuran 0,5 sampai 5 gross tonnage (GT). Kelemahan dari menggunakan armada kecil antara lain para nelayan memiliki hari layar yang singkat (one day fishing), daya tampung ikan hasil tangkapan yang kecil, kualitas ikan yang kurang terjaga atau tingginya tingkat kehilangan mutu (losses), yang berakibat pada daya jual yang rendah, sementara biaya produksi terus meningkat. Kondisi seperti ini, ditambah dengan keterbatasan untuk memanfaatkan dana perbankan, semakin menyulitkan para nelayan untuk keluar dari jerat kemiskinan yang melilit dari tahun ke tahun.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi, dapat kita bagi menjadi :

a. Masalah internal bidang kelautan dan perikanan :

1. Sebagian besar nelayan perikanan tangkap masih tradisional dengan struktur armada penangkapan masih didominasi perikanan skala kecil tonase <10 GT
2. Ketimpangan pemanfaatan stock ikan antar kabupaten/Kota
3. Praktek ilegal fishing
4. Pengembangan perikanan budidaya belum optimal
5. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
6. Belum optimalnya pengelolaan konservasi laut dan perairan umum
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan
8. Akses pasar produk perikanan nasional belum ada

b. Masalah eksternal, yang mempengaruhi kelautan dan perikanan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan
2. Konflik antar nelayan daerah karena akses dari pengertian penerapan Otonomi daerah yang salah.
3. Penerapan Teknologi yang masih rendah
4. Belum adanya dukungan permodalan yang memadai
5. Tata ruang dan pengendalian pencemaran belum memadai
6. Keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha
7. Penegakan hukum (law enforcement) masih lemah

BAB IV.
TUJUAN, DAN SASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE

4.1.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi RPJMD 2016 s/d 2021 Kota Ternate, maka tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2016- 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong percepatan peningkatan Pembangunan Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim dalam bentuk pengembangan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim Dan Pesisir,
- b) Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan Dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah Budaya Dan Bahari
- c) Meningkatkan Kemampuan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan;
- d) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berbasis IPTEK;
- e) Meningkatkan Porduksi dan mutu hasil perikanan;
- f) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung sumberdaya kelautan dan perikanan
- g) Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan

1.1.2. Sasaran

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di atas, maka dirumuskan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kota Ternate, sebagai berikut:

- a) Terlaksananya Pembangunan Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim dalam bentuk pengembangan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim Dan Pesisir,
- b) Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan Dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah Budaya Dan Bahari
- c) Mendorong percepatan peningkatan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan

- d) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berbasis IPTEK
- e) Meningkatkan mutu hasil perikanan
- f) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung sumberdaya kelautan dan perikanan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1									
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENGAH PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE									
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/SASARAN				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Masyarakat Pesisir	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir	Meingkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (Ton)	28.722.83	31.260,83	31.211,00	32,433.00	32,980.00
			Meningkatnya Produksi Olahan dan Diversifikasi Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Olahan	52 Unit	65 Unit	70 Unit	85 Unit	97 Unit
				Jumlah Kelompok Pengolah yang Terbina	12 Klp	13 Klp	15 Klp	23 Klp	30 Klp
2			Meningkatnya Pemulihan wilayah Ruang Laut dan Pesisir	Peningkatan Kawasan Pemulihan Ekosistem Mangrove	0.05 HA	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1,5 Ha
				Menurunnya Tingkat Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	1,5HA	1 Ha	1 Ha	1 Ha	0.05 Ha
			Meningkatnya Perlindungan di Wilayah Penangkapan	Berkurangnya Pelanggaran Hukum Dilaut	4 Kasus	3 Kasus	3 kasus	3 Kasus	2 Kasus

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mekanisme penyusunan kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan atas perpaduan antara arah kebijakan nasional (*top down policy*) dan arah kebijakan daerah (*bottom up planning*). Kebijakan dan program mengacu kepada Rencana Strategis dan RPJMD Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilakukan sesuai kewenangan dan kapasitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate sebagaimana yang diatur dalam Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Aparatur Pemerintah. Hal ini terkait pula dengan arah kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan yang menjadi acuan dalam menggerakkan potensi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud.

Adapun strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses Masyarakat Pesisir
2. Memperkuat sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan kemandirian masyarakat kelautan dan perikanan melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar;
4. Standarisasi dan modernisasi sarana dan prasarana perikanan tangkapan dan budidaya;
5. Penyediaan dan distribusi induk dan benih unggul
6. Berperan dalam pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis kelautan dan perikanan (PPI Dufa-Dufa dan PPN Bastiong)
7. Mengembangkan dan meningkatkan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (*quality insurance and food safety*);
meningkatkan akses masyarakat terhadap investasi dan permodalan;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan;

9. Standarnisasi dan modernisasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan;
10. Meningkatkan kerjasama antar daerah;
11. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, penguatan dan pengembangan kelembagaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
12. Pemetaan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
13. Rehabilitasi ekositim terumbu karang, mangrove dan vegetasi pantai;
14. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong terbangunnya konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berupa pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir, revitalisasi ekosistem perairan umum, pengembangan teknologi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Untuk itu kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dalam upaya menunjang pembangunan di Kota Ternate adalah:

- 1) Pengelolaan Wilayah Pesisir pengembangan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim Dan Pesisir
- 2) Pengelolaan Wilayah Wisata Bahari
- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;'
- 4) Optimalisasi pengembangan perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- 5) Peningkatan mutu dan nilai tambah produk dan pemasaran hasil perikanan;
- 6) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- 7) Meningkatkan peran unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- 8) Mengembangkan DIKLATLUH (Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan) guna memperkuat kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan perikanan

Program Dinas pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistim AKIP), dan Rumusan Renstra yang merupakan rencana

jangka menengah (lima tahunan) yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disertai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui, maka ditetapkan suatu Program Dinas yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat/amanah untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dengan demikian Program Dinas merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja kepada pihak yang memberi amanah.

Proses Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2016 - 2021 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Walikota Ternate ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor Kelautan dan perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada tiap bidang Pemerintahan lengkap dengan tolak ukurnya.

Secara hirarki Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dijabarkan secara spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pada lingkup pemerintah Kota Ternate. Untuk itu dalam rangka penetapan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan perikanan Kota Ternate, didahului dengan penjaringan aspirasi dari bawah yang direpresentasikan dalam bentuk usulan program/kegiatan dari desa dan kecamatan. Untuk selanjutnya dipadukan dengan rangkaian rencana program dan kegiatan aspirasi dinas yang diupayakan dalam bentuk Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate akan melaksanakan program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut;

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA TERNATE

Kota Ternate

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir tahun periode Renstra perangkap Daerah (2021)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020		Target	Rp							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Wilayah Pesisir	Meningkatkan Perlindungan wilayah Pesisir	3 01 3 01 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah elompok Pembebrdayaan masyarakat pesisir	Klp	30	45	719,850,160	45	956,273,500	194	400,000,000	194	1,198,202,000	175	1,600,000,000	175	1,650,000,000	PRL						
			Pendampingan Kegiatan CCDD IFAD	Jumlah kelurahan sasaran Program CCDD IFAD	Kelurahan	100%	17	719,850,160	17	746,740,000	0	0										Tafaga, Tafamutu, Moti Kota, Figur,			
			Penghijauan Hutan Mangrove	Luasan area penghijauan Hutan Mangrove dan Jumlah Anakan Mangrove	Anakan	0	-	0	17,700.00	149,865,000	7,500.00	100,000,000	3,000	119,825,000	6,000	300,000,000	6,000	300,000,000				Kota Ternate			
			Pembentukan P3MP Kota Ternate	Jumlah kelompok P3MP yang terbentuk	kelompok	0	-	0	1	59,668,500	0	0	0	-	0								Kecamatan Batang Dua		
			Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang	Luasan area rehabilitasi terumbu karang (Jumlah Lokasi/titik)	Lokasi	0	0	0			4	100,000,000	4	150,000,000	4	400,000,000	4	500,000,000					Kota Ternate		
			Pemantauan KMP Pasca Program CCDD IFAD	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan sasaran kegiatan CCDD IFAD	Kelompok						140	200,000,000	140	228,625,000	140	250,000,000	140	350,000,000						Kota Ternate	
			Gerakan Bersih Pantai	Jumlah Lokasi Pantai yang dibersihkan	Kegiatan		0	0		0		0	1	49,752,000	2	100,000,000	2	100,000,000						Kota Ternate	
			Pengadaan Alat Selam	Jumlah Peralatan Selam	Set			0		0		0	6	400,000,000	0									Kota Ternate	
			Pelatihan Scuba Diving (Open Water and Advance)	Jumlah Sertifikat Pelatihan	Sertifikat	15	0						30	250,000,000											Kota Ternate
				Pembuatan data base tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang Kota Ternate		Jumlah Dokumen	Dokumen									1	300,000,000	1	150,000,000						Kota Ternate
	Pengelolaan perikanan Berbasis ekosistem		Jumlah Dokumen	Dokumen									1	250,000,000	1	250,000,000						Kota Ternate			

	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Sumber daya Wilayah Pesisir dan Maritim	3	01	3	01	01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi budidaya perikanan	Kg	4,578	5000	55,200,000	6,000	50,000,000	8,000	59,200,000	10,000	616,700,000	15,000	1,300,000,000	20,000	1,030,000,000	TANGKAP DAN BUDIDAYA		
		3	01	3	01	01	04	Biaya Operasional Balai Benih Ikan	Tersedianya Operasional BBI	Bulan	0	12	55,200,000	12	50,000,000	12	59,200,000	12	59,200,000	12	100,000,000	12	80,000,000		BBI Gambesi	
		3	01	3	01	01	04	Rehabilitasi kolam BBI (2015)	Jumlah Kolam yang direhabilitasi	Unit	2	0	-	0	-	0	-	0	-	4	200,000,000	4	200,000,000		BBI Gambesi	
		3	01	3	01	01	05	Pengadaan Alat Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/Mutu Benih	Jumlah alat Pengukur dan Pemeriksa kesehatan ikan	set	0	0	-	0	-	0	-	1	280,000,000	1		1			BBI Gambesi	
		3	01	3	01	01	06	Kajian tentang Potensi Budidaya Perikanan Laut (2015)	Tersedianya data-data potensi budidaya perikanan Laut	%	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-		
		3	01	3	01	01	06	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan	Jumlah Mesin Pembuat Pakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	1	137,500,000	1		1			BBI Gambesi	
		3	01	3	01	01	07	Penyediaan Calon induk unggul beserta pakan	Ketersediaan induk unggul beserta pakan	Indukan	0	0	-	0	-	0	-		140,000,000						BBI Gambesi	
								Pengadaan sarana dan prasarana budidaya rumput laut	Jumlah Unit saprodi budidaya rumput laut	Unit									4	400,000,000	4	150,000,000			Kota Ternate	
								Percontohan Budidaya udang tradisional	Tersedianya paket percontohan nelayan	Paket									2	300,000,000	2	300,000,000			BBI Gambesi	
								pengembangan/Percontohan Ikan Air Tawar	Jumlah bibit ikan Air Tawar	Paket									1	200,000,000	2	300,000,000			Kota Ternate	
								Percontohan Budidaya Rumpur Laut	Jumlah Bibit Rumpur Laut	Paket									1	400,000,000	1	300,000,000			Kota Ternate	

	Meningkatnya Pengelolaan Potensi	3	01	3	01	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25,824.00	28,723	6,707,016,960	31,631	2,930,587,196	32,466	3,606,807,000	32,876	6,652,219,000	33,000	10,350,000,000	33,546	10,725,000,000	PDS	
	Sumber daya Wilayah Pesisir dan Maritim	3	01	3	01	01	21	01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang didampingi	kelompok	0	300	112,608,960	0	-	79	37,550,000	401	37,550,000	400	125,000,000	400	125,000,000	DKP KT
		3	01	3	01	01	21	08	Biaya Operasional PPI	Tersedianya Biaya Operasional PPI	Bulan	12	12	85,980,000	12	100,000,000	12	194,600,000	12	108,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	PPI Dufadufa
		3	01	3	01	01	21	09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pokok, Fungsional dan Penunjang Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana prasarana pokok yang dibangun	Unit	0	1	2,110,000,000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kota Ternate
		3	01	3	01	01	21	10	Pendampingan Tugas Pembantuan Program Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang didampingi	kelompok	0	0	-	70	97,300,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Kota Ternate
		3	01	3	01	01	21	11	Pengadaan Armada 1,5 GT (Ketinting)	Jumlah Armada Ketinting dan Mesin	Unit	56	50	1,350,000,000	27	820,870,200	25	875,000,000	20	700,000,000	50	1,750,000,000	50	1,750,000,000	Kota Ternate
		3	01	3	01	01	21	12	Sosialisasi dan Pendataan Asuransi Nelayan	Jumlah Nelayan yang memiliki asuransi	Orang	0	0	0	80	50,000,000	79	49,057,000	85	59,500,000	85	150,000,000	85	150,000,000	DKP KT
		3	01	3	01	01	21	15	Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dangkal)	Jumlah Rumpon Laut Dangkal	Unit	4	2	165,670,000	-	0	2	160,000,000	2	170,000,000	6	510,000,000	6	850,000,000	Kota Ternate
		3	01	3	01	01	21	16	Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)	Jumlah Rumpon Laut Dalam	Unit	4	4	400,000,000	0	-	2	200,000,000	10	1,000,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	Kota Ternate
		3	01	3	01	01	21	17	Pengadaan Armada Ikan Tuna 2 GT	Jumlah Armada 2 GT	Unit	-	-	-	0	-	20	2,042,000,000	22	2,990,164,000	30	3,000,000,000	30	3,000,000,000	Kota Ternate
		3	01	3	01	01	21	26	Pengadaan Armada Ikan Tuna 3 GT	Jumlah Armada Penangkapan Ikan 3 GT	Unit	13	10	1,287,000,000	12	1,862,416,996	0	-	4	560,000,000	4	1,400,000,000	4	1,400,000,000	Kota Ternate
									Pengadaan Kapal Penampung Ikan 5 GT	Jumlah Kapal Penampung Ikan 5 GT	Unit	2	2	695,758,000	0	-	0	-	0	-	1	375,000,000	1	375,000,000	Kota Ternate
										Jumlah armada 10 GT	Unit	0	1	500,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kota Ternate
									Pengadaan mesin Motor tempel 30 PK	Jumlah Mesin Motor Tempel 30 PK	Unit									15	375,000,000	15	570,000,000	Kota Ternate	

	3	01	3	01	01	21	18	Pengadaan Kapal Penangkapan Umpan Ikan Cakalang (Bagan)	Jumlah Bagan	Unit	3	0	-	0	-	0	-	2	800,000,000		-	0	0			Kota Ternate
	3	01	3	01	01	21	22	Pengadaan GPS	Jumlah Alat GPS	Unit	0	0	-	0	-	0	-	11	50,000,000							
	3	01	3	01	01	21	23	Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok sasaran kegiatan sosialisasi	Klp	0	0	-	0	-	22	48,600,000	0	-	34	50,000,000	34	50,000,000			Kota Ternate
	3	01	3	01	01	21	24	Sosialisasi Bantuan Permodalan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	Jumlah Kelompok sasaran kegiatan sosialisasi	Kelompok	0	0	-	0	0	0	-	30	57,577,000	20	100,000,000	20	100,000,000			DKP KT
	3	01	3	01	01	21	25	Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi dan Teknologi Penangkapan	Jumlah Kelompok sasaran kegiatan sosialisasi	kelompok	0	0	-	0	-	0	-	30	64,428,000	30	100,000,000	30	100,000,000			DKP KT
	3	01	3	01	01	21	27	Pengadaan Jaring umpan ikan cakalang (Kofo)	Jumlah Jaring umpan ikan cakalang (kofo)	set	0	0	-	0	-	0	-	0	55,000,000	3	150,000,000	3	400,000,000			Kota Ternate
								Pengadaan mesin Motor tempel 15 PK	Jumlah Mesin Motor tempel 15 PK	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	15	570,000,000	15	570,000,000			Kota Ternate
								Pengadaan mata kail pole in line	Tersedianya mata kail pole in line	Paket	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	200,000,000	2	200,000,000			Kota Ternate
								Sosialisasi dan pelatihan mesin Out Board dan In Board	Jumlah Kelompok sasaran kegiatan sosialisasi	Klp	0	0	-	0	-	0	-	0	-	10	100,000,000	10	100,000,000			DKP KT
								Pengadaan operasional kendaraan roda dua petugas statistik	Operasional Roda Dua	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	70,000,000	2	60,000,000			Kota Ternate
								PENAS	Jumlah Peserta Kegiatan PENAS	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	15	400,000,000	15	-			Kota Padang

Meningkatkannya Pengelolaan Potensi	3	01	3	01	01	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produksi olahan perikanan	Ton	800	19,000	779,384,320	20,445	3,867,466,000	21,322	1,187,200,000	21,900	653,723,000	22,000	1,660,000,000	23,000	1,610,000,000			
Sumber daya Wilayah							Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha	Jumlah Sertifikat diperoleh Aparatur dan Pelaku Usaha	Sertifikat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	12	50,000,000	12	50,000,000		Kota Ternate	
Pesisir dan Maritim							Pembentukan Pelelangan IkanPPI Dufa-dufa	Jumlah Sarana dan Prasarana dan modal Pelaksanaan pelelangan	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	50	1,000,000,000	50	1,000,000,000		Kota Ternate	
							Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Olahan Perikanan	Jumlah Kecamatan sasaran Kegiatan movev	kecamatan	0		389,692,160		1,933,733,000		593,600,000		-	4	50,000,000	4	50,000,000		Kota Ternate	
	3	01	3	01	01	23	02	Pendampingan Manajemen bagi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	0	6	35,902,580	10	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	27	60,000,000	27	60,000,000		Kota Ternate
	3	01	3	01	01	23	05	Biaya Operasional Depo Higienis	Persentase biaya operasional depo higienis	Bulan	12	12	11,160,000	-	-	0	-	0	-	0	-	0			
	3	01	3	01	01	23	06	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pabrik Rumput Laut	Jumlah sarana prasarana penunjang pabrik rumput laut	meter/unit	2	32	84,444,190	1	1,135,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0		
	3	01	3	01	01	23	07	Pengadaan alat dan Prasarana Kemasan Produk Olahan Perikanan	Jumlah alat dan prasarana kemasan produk olahan perikanan	Unit	26		100,000,000	16	206,993,000	-	0	-	0	-	0	-	0		
	3	01	3	01	01	23	11	Pemantauan Produk Olahan Ikan Sehat	Jumlah Kecamatan sasaran kegiatan pemantauan produk olahan ikan sehat	kecamatan	0	7	21,566,000	7	35,000,000	7	48,800,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000		Kota Ternate
	3	01	3	01	01	23	12	Program Nasional Gemar Makan Ikan	Jumlah Partisipan dalam kegiatan gemar makan ikan	kecamatan	0	6	36,643,370	6	200,000,000	7	200,000,000	8	230,000,000	7	250,000,000	7	200,000,000		Kota Ternate
	3	01	3	01	01	23	13	Pendampingan Tugas Pembantuan Program Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok yang didampingi	Orang	0	77	99,976,020	5	156,740,000	10	50,000,000	0	60,000,000	0		0	60,000,000		DKP

			3	01	3	01	01	23	15	Penyediaan Rumah Produksi Hasil Olahan	Jumlah Peralatan rumah produksi hasil olahan	Unit	0	0	0	47	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0			
			3	01	3	01	01	23	19	Promosi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	169,800,000	1	135,000,000	1	135,000,000	135,000,000	Luar Daerah		
			3	01	3	01	01	23	20	Sertifikasi KUB dan Poklasar (IRT dan Sertifikat Halal)	Jumlah sertifikat Halal yang dibuat	kelompok	0	0	0	0	0	15	75,000,000	20	75,000,000	20	75,000,000	20	75,000,000	Kota Ternate	
									06	Pelatihan sertifikasi dan standar mutu Olahan	Banyaknya kegiatan pelatihan sertifikasi standar mutu olahan	Kegiatan										1	50,000,000	1	50,000,000	Kota Ternate	
			3	01	3	01	01	23	22	Pembentukan Kelompok KUB dan Poklaskar	Jumlah Kelompok yang dibentuk	Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	10	53,723,000	10	75,000,000	10	75,000,000	Kec. Bazang Dua, Moti Hiri, The Selatan, The tengah, The Utara, The Tengah, Pulau Ternate	
										Penyediaan sarana Penyuluh Perikanan	Tersedianya sarana Penyuluh Perikanan	Unit	10	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

	3	01	3	01	01	27	01	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran	Unit	3	3	0	2	0	2	1,007,639,500	4	6,170,000,000	54	2,300,000,000	54	1,350,000,000	PDS		
		3	01	3	01	01	27	01	Pengadaan alat dan sarana Kemasan Produk Olahan Perikanan	Jumlah alat dan sarana kemasan produk olahan perikanan	Unit	0	0	0	0	0	-	0	0	150,000,000	10				Kota Ternate	
		3	01	3	01	01	27	04	Penyediaan Peralatan Rumah Produksi Hasil Olahan	Jumlah Peralatan rumah produksi hasil olahan	Unit	0	0	0	0	0	100	120,000,000	110	150,000,000	10				Kota Ternate	
		3	01	3	01	01	27	05	Pengadaan Pabrik Es Mini 600 Kg	Pembangunan Pabrik es mini 600 kg	buah	0	0	0	0	0	1	887,639,500	0	0	1	950,000,000		950,000,000	Kecamatan Hiri	
		3	01	3	01	01	27	07	Pembuatan Tangki Air Bersih Kapasitas 4000 Liter	Terbangunnya tangki air	unit			0			0	400	720,000,000						Kota Ternate	
		3	01	3	01	01	27	08	Pengadaan Sarana Rantai Dingin (Cool Box 200 PC)	Jumlah Cool Box Yang di serahkan Kepada Masyarakat	Unit	0	0	0	0	0	30	0	40	200,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000	DKP	
								04	Pengadaan Pabrik Es Mini 1 Ton	Terpenuhinya kebutuhan Es Balok untuk nelayan	Unit									1	950,000,000	1			Kecamatan Hiri	
		3	01	3	01	01	27	09	Revitalisasi Pabrik ES PPI	Presentase Revitalisasi Pabrik Es	%	0	0	0	0	0	0	100	3,250,000,000						PPI Dufa-dufa	
		3	01	3	01	01	27	10	Pembangunan saluran Keliling Pabrik Rumput Laut	panjang saluran Yang di buat	Meter			0			0		700,000,000						Kelurahan Kastela	
		3	01	3	01	01	27	11	Revitalisasi Coolstorage dan ABF PPI Dufa-dufa	Operasi Coolstorage dan ABF PPI Dufa-dufa dapat berjalan dengan baik	Unit	0	0	-	0	-	0	-	2	1,000,000,000						PPI Dufa-dufa
								05	Revitalisasi Pabrik ES 600 kg Kec. Moti	Jumlah sarana prasarana pabrik es	Unit									1	750,000,000	1	750,000,000		Kecamatan Moti	
									Pengadaan Sarana Pemasaran Kendaraan roda 3	Jumlah sarana pemasaran kendaraan roda tiga	Unit									2	100,000,000	2	100,000,000		Kota Ternate	
									Penyediaan SAPRAS kemasan dan rumah Produksi Olahan Perikanan	Jumlah Kelompok penerima perlengkapan penunjang produksi olahan	kelompok								0	12	200,000,000	12	200,000,000		Kota Ternate	

				3	01	3	01	01	28	Program Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan	Penurunan jumlah pelanggaran di laut	kasus	1	3	7,999,570.00	0	-	3	145,840,100.00	3	169,913,800.00	4	316,000,000.00	4	307,000,000.00	PENGAWASAN		
				3	01	3	01	01	28	01	Operasi Pengawasan	Intensitas Operasi Pengawasan	Kali	0	0	0	0	3	68,776,300	3	75,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000		kota Ternate	
				3	01	3	01	01	28	02	Pembentukan Kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang terbentuk	Kelompok	0	2	7,999,570	0	-	2	32,400,000	2	35,400,000	3	60,000,000	3	60,000,000		kota Ternate
				3	01	3	01	01	28	03	Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah penyuluhan hukum yang dilakukan	Kelurahan	0	0	0	0	-	2	32,973,800	2	36,973,800	2	60,000,000	2	60,000,000		kota Ternate
				3	01	3	01	01	28	04	Konsultasi dan Koordinasi PSDKP di luar Daerah	Jumlah Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi PSDKP di luar daerah	Kali	0	0	0	0	-	1	11,690,000	1	22,540,000	2	36,000,000	2	36,000,000		Luar Daerah
										09	Bimtek Petugas pengawasan perikanan	Jumlah sertifikat yang diperoleh	Sertifikat									2	60,000,000	2	51,000,000		Jakarta	
				3	01	3	01	01	30	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wiayah Berbasis Maritim dan Pesisir	Jumlah Infrastruktur wilayah pesisir	Unit/ mtr	0	1		2	563,791,400	2	250,000,000	2	200,000,000	1	200,000,000	2	200,000,000	PRL		
				3	01	3	01	01	30	01	Pembuatan Marine Boy	Jumlah Marine Boy yang dibuat	Unit	0	0	0	0	-	12	100,000,000	0	0		0	0		Dufa-dufa, Gamalama, Kampung Makasar Timur	
				3	01	3	01	01	30	02	Pembuatan Talud Penahan Ombak	Pembangunan talud di kelurahan gamalama	meter	0	0	0	36	179,000,000	0	-	0	0	0	0	0			
				3	01	3	01	01	30	03	Penataan dan Pemanfaatan Wisata Bahari	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Wisata Bahari	Lokasi	0	0	0	1	384,791,400	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	2	200,000,000		Kota Ternate

	3	01	3	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Tahun Berkenaan	Presentase	100	100	1,972,697,240	100	1,946,244,500	100	1,653,777,100	100	2,773,416,000	100	2,487,000,000	100	2,487,400,000			
	3	01	3	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang menggunakan Jasa Pengiriman	Surat/dokumen	349	394	2,640,000	512	2,800,000	395	2,900,000	420		450	4,000,000	12 Bulan	4,000,000	DKP	DKP	
	3	01	3	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, listrik	Kali pembayaran	12	12	743,500,000	12	650,000,000	12	498,500,000	12	461,256,000	12	650,000,000	12 Bulan	650,000,000	DKP	DKP	
								Penambahan Daya Listrik	Va								500,000,000	4500		4500					
	3	01	3	01	01	01	07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Pembayaran Petugas Administrasi Keuangan	OB	10	10	56,400,000	11	57,000,000	11	61,800,000	11	69,198,000	12 OB	75,000,000	12 Bulan	75,000,000	DKP	DKP
								Jumlah Materai 6000	Lembar	300	300	2,100,000	340	2,380,000	300	2,100,000									
								Jumlah Materai 3000	Lembar	200	135	540,000	105	420,000	200	800,000									
	3	01	3	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang digunakan	Kuantitas	355	756	24,996,730	421	24,654,000	802	24,487,360	201	30,000,000	0	38,000,000	12 Bulan	38,400,000	DKP	DKP	
								Jumlah Cetakan	Eksemplar	135	95		51		53		45		65		65		DKP	DKP	
	3	01	3	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan	Lembar	21,838	15,400	8,558,500	15,450	8,671,500	15,500	8,512,900	15	13,538,000	17	25,000,000	17	25,000,000	DKP	DKP	
								Spanduk/Baliho	M ²	0	45		47		49		14		49		49				
	3	01	3	01	01	12	Penyediaan Peralatan dan Komponen instalasi listrik	Jumlah Komponen instalasi listrik yang digunakan	Kuantitas	55	86	4,641,530	75	4,402,000	80	7,489,840	70	461,256,000	80	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	DKP	DKP	
	3	01	3	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)	Kuantitas	3	4	5,520,000	4	5,760,000	3	5,892,000	4	12,116,000	2	15,000,000.00	Eksempla	15,000,000.00	DKP	DKP	
	3	01	3	01	01	17	Makanan dan Minuman Pegawai, tamu dan rapat	Penyediaan makanan dan minuman rapat	OB	140	168		574		0				12		12		DKP	DKP	
								Penyediaan makanan dan minuman tamu	OB	100	90	212,580,000	317	253,740,000	680	165,120,000		306,120,000	16	300,000,000.00	12	300,000,000.00	DKP	DKP	
								Penyediaan Makan Minum Pegawai	OB	62	64		64		64	64		64		64					
	3	01	3	01	01	18	Biaya Rapat/Konsultasi/Koordinasi Ke Pusat dan dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Konsultasi di dalam daerah	Kali	1	1	137,800,000	1	192,690,000	1	178,510,000		373,174,000	12 Kal	550,000,000.00	10 Kegiatan	550,000,000.00	Ternate dan Jakarta	Ternate dan Jakarta	
								Jumlah Kegiatan Koordinasi/Konsultasi di luar daerah	Kali	1	1		1		1										
	3	01	3	01	01	20	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Pembayaran Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	OB	157	103	730,334,460	103	685,192,000	104	648,215,000	104	496,758,000	105	750,000,000.00	12 Bulan	750,000,000.00	DKP	DKP	
	3	01	3	01	01	21	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya	Presentase Terlaksananya Kegiatan Operasional lainnya	Kegiatan	1	1	43,086,020	1	58,535,000	1	49,450,000	1	50,000,000	1	55,000,000.00	1 Laporan	55,000,000.00	DKP	DKP	

3	01	3	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Dokumen/ Laporan	10	2	92,561,330	2	97,631,090	2	90,125,000	2	119,586,000	8	258,900,000	8	253,500,000		
3	01	3	01	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKIP)	Jumlah LKIP PD yang tersusun	Laporan	1	3	83,275,940	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	10,000,000	1	7,000,000	DKP KT
3	01	3	01	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Semesteran yang tersusun	Dokumen	1	1	4,599,980	1	5,001,260	1	5,000,000	1	5,000,000	1	6,900,000	1	5,000,000	Sekretariat
3	01	3	01	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen	1	1	4,685,410	1	9,999,830	1	5,000,000	1	5,000,000	2	10,000,000	2	9,500,000	Sekretariat
3	01	3	01	01	06	05	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas yang tersusun	Laporan	1	0	0	1	5,000,000	1	7,000,000	1	17,696,000	1	15,000,000	1	15,000,000	DKP KT
3	01	3	01	01	06	06	Penyusunan Statistik Perikanan	Jumlah Laporan Statistik Perikanan yang tersusun	Dokumen	1	0	0	1	70,630,000	1	59,125,000	1	45,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	Sekretariat
3	01	3	01	01	06	07	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah Laporan Tahunan yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	-	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	Sekretariat
						07	Lanjutan Revisi Renstra	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	Dokumen									1	50,000,000	1		75,000,000	
3	01	3	01	01	06	09	Revisi Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	Dokumen	5	0	0	0	-	0	-	1	32,890,000	2				Sekretariat
							Monitoring dan Evaluasi	Banyaknya kegiatan monev yang dilakukan	Kegiatan	1								1	100,000,000	1		75,000,000	DKP KT

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
2. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangari bangunan kantor
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
4. Penyediaan bahari bacaan dan peraturan perundang-undangan.
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Pembangunan gedung kantor.
2. Pengadaan kendaraan dinas / oprerasional.
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
4. Pengadaan Peralatan gedung kantor.
5. Pengadaan Mobeuler.
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung.
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
10. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
11. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas I operasional.
12. Pemagaran lingkungan kantor dan Pangkalan Pendaratan Ikan
13. Pembangunan fasilitas Pangkalan Pendaratan kan.
14. Pembangunan Fasilitas Balai Benih Ikan.
15. Pembangunan rumah jaga Pangkalan Pendaratan Ikan.
16. Pengadaan perlengkapan rumah jaga Pangkalan Pendaratan ikan.
17. Pembangunan fasilitas Balat Benih Ikan.
18. Pembangunan rumah jaga Balai Benih Ikan.
19. Pengadaan perlengkapan rumah jaga Balai Benih Ikan.
20. Pembangunan gedung pertemuan.
21. Pengadaan perlengkapan gedung
22. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jaga Pangkalan Pendaratan Ikan.

23. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jaga Balai Benih Ikan.

24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Pengadaan pakalan kerja lapangan.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

Kegiatan yang akan dilaksanakan

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

2. Pelatihan teknis pengukuran dan perpetaan.

3. Pelatihan Perencanaan Kelautan dan Perikanan Partisipatif.

4. Pelatihan budidaya ikan.

5. Pelatihan pengelolaan perairan berbasis masyarakat.

6. Pelatihan lokalatih ekosistem sumberdaya perikanan.

7. Pelatihan pengendalian ekosistem perairan.

8. Pelatihan pengelolaan hutan mangrove.

9. Pelatihan pengelolaan BBI.

10. Pelatihan teknis budidaya ikan emas dan nila bagi petugas.

11. Pelatihan teknis pembesaran ikan kerapu bagi petugas.

12. Pelatihan teknis penggunaan alat tangkap iongline bagi nelayan.

13. Pelatihan teknis penanganan ikan segar di kapal bagi petugas.

14. Pelatihan teknis perawatan alat tangkap ikan.

15. Pelatihan teknis perawatan dan perbaikan mesin (in board I out board) motor ikan bagi nelayan.

16. Pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan.

17. Pelatihan system pengawasan perikanan bagi petugas.

V. Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Kegiatan yang akan dilaksanakan

1. Pelatihan nelayan dan pelaku bisnis perikanan.

2. Penyuluhan dan pendampingan nelayan dalam melaksanakan usaha perikanan.

3. Peningkatan kemampuan lembaga nelayan.
4. Pelatihan Budidaya ikan dan pasca panen.
5. Penyuluhan Pengendalian mutu hasil perikanan.
6. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan.
7. Penyuluhan untuk penerapan teknologi tepat guna.

VI. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

1. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
3. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
4. Peningkatan sarana dan prasarana Koperasi Binaan.
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat pesisir.
6. Pengembangan paket Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN).
7. Penyediaan sarana operasional BPR pesisir.

VII. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1. Pengadaan sarana operasional pengawasan (Speed Boad).
2. Pemantauan dan Pengawasan IUU fishing, jasa kelautan dan ekosistem laut.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan.
4. Penggalangan dan pembinaan Pokmaswas Kota Ternate.

VIII. Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

1. Pemeliharaan rutin/berkala Balai benih Ikan (BBI).
2. Peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih ikan (BBI).
3. Pelatihan tekhnis pembenihari ikan air tawar.
4. Magang pengelolaan budidaya ikan air tawar
5. Pembangunan kolam percontohari budidaya ikan air tawar.
6. Pengadaan Kendaraan (Roda Dua) Operasional dan BBI.

IX. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

1. Pemeliharaan rutin/berkala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
2. Pengadaan sarana operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3. Pengadaan Mesin Cold strage.
4. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan khusus penerapan teknologi Penangkapan.
5. Studi banding Tata Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
6. Pembangunan pagar keliling kompleks PPI.
7. Pembangunan drainase/saluran pembuangan air kompleks PPI.
8. Peningkatan fasilitas pokok, sarana dan prasarana PPI
9. Pengadaan Kendaraan (Roda empat) Operasional PPI).
10. Pengadaan sarana alat bantu penangkapan / Rumpon Laut Dalam.
11. Pengadaan sarana alat bantu penangkapan Rumpon Laut Dangkal.
12. Bantuan armada penangkapan ikan dasar.
13. Pengadaan Motor Tempel (Ketinting).
14. Pengadaan Motor Tempel 15 PK.
15. Bantuan caner Boat (armada penampung hasil tangkapan).
16. Bantuan Pengadaan Janing (ikan pelagis kecil).
17. Bantuan armada Purse Seine (Pajeko).
18. Bantuan armada penangkapan ikan tuna dan cakalang.
19. Pembangunan jembatan perahu.
20. Pembangunan pasar ikan higienis.

X. Program Pengembangan Sistim Penyeluhan Perikanan.

1. Penyediaan sarana pusat informasi perikanan.
2. Pengembangan data dan statistik perikanan.
3. Pembinaan dan pengembangan sistim usaha perikanan.
4. Pendidikan dan pelatihan penerapan teknolog perikanan.

- XI. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
 - 1. Pendidikan dan pelatihan khusus pengolahan ikan.
 - 2. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolah hasil perikanan
 - 3. Pengumpulan dan analisis data pemasaran dalam Kota Ternate dan Sekitarnya.
 - 4. Peningkatan kapasitas sarana pengolah ikan.
 - 5. Pembinaan pola kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran.

- XII. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut air Payau dan Air Tawar.
 - 1. Pembuatan profil sumberdaya wilayah pesisir dan Laut Kota Ternate
 - 2. Work Shop pengembangan kawasan pesisir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate akan melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tabel berikut

No	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	RUMUS	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TAHUNAN/SASARAN				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4		7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan wilayah Pesisir	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Maritim	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kota Ternate		138,11	148,10	159,12	160,10	162,12	165,11
			Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Jumlah produksi tahun berjalan} - \text{Jumlah produksi tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi tahun lalu}} \times 100\%$	25.814,85	28.722.83	31.260,83	31.211,00	32,433.00	32,980.00
			Produksi Perikanan Budidaya		456,2	1,340.2	2,447.14	1,222.10	544.10	2,103.00
2	Meningkatnya Perlindungan Wilayah Pesisir dan Maritim	Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove	Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove	$\frac{\text{Jumlah areal rehabilitasi mangrove}}{\text{Jumlah areal mangrove}} \times 100\%$	22%	41%	24%	20%	15%	10%
			Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	$\frac{\text{Jumlah wilayah pemulihan}}{\text{Jumlah wilayah terumbu karang}} \times 100\%$	23%	31%	12%	12%	11%	8,5%

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kota Ternate tahun 2016 – 2021 ini dibuat untuk menentukan arah pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun ke depan sekaligus merupakan sarana untuk mencapai tujuan –tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung program-program pembangunan Kota Ternate.

Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan kelautan dan perikanan serta tolok ukur. Karena itu dengan Renstra ini diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Harapan kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Ternate serta penyelenggara pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
KotaTerna

H. Ruslan Bian, SP. M.Si.
Nip: 196711061989031008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel II. Deskripsi dari pengintegrasian (SO, ST, WO, dan WT), dapat dijabarkan dalam matriks identifikasi kondisi internal dan eksternal Dinas Kelautan dan perikanan Kota Ternate Kota Ternate sebagai berikut :

No	Bidang	Kekuatan /Strengt (S)	Kelemahan/Weakness (W)	Peluang/Opurtunity (O)	Ancaman /Treath (T)
1.	Kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar - Adanya legislasi dan regulasi kelautan dan perikanan - Posisi geografis yang strategis - Adanya kelembagaan dan kemitraan - Pengelolaan Wilayah pesisir - Adanya dukungan dana rutin (APBN dan APBD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana, prasarana - Terbatasnya kualitas dan kuantitas - Terbatasnya pengawasan dan penegakan hokum - lemahnya kelembagaan dan usaha kecil - Lemahnya data informasi dan akes pasar -lemahnya produk kelautan perikanan eksisting 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya teknologi dan informasi kelautan dan perikanan - Meningkatnya permintaan produk perikanan - Berlakunya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean . - Berkembangnya produk non konsumsi - Meningkatnya kegiatan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> -Cuaca ekstrem dan <i>climate change</i> yang berpengaruh pada pengelolaan perikanan tangkap maupun budidaya -Hama dan penyakit yang menyerang budidaya perikanan -<i>Illegal Fishing</i> atau masih adanya praktek-praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab -Penggunaan bahan makanan, obat, bahan kimia berbahaya e. Pencemaran dan degradasi lahan -Adanya konflik kepentingan